

Demi Warga, Bima Arya Beri Pesan Khusus ke DKPP Kota Bogor

BOGOR (IM)- Pesan khusus disampaikan Wali Kota Bima Arya untuk Dinas Ketahanan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor. Pesan Bima Arya untuk DKPP Kota Bogor, itu terkait pemanfaatan lahan pertanian. Bima Arya ingin, DKPP Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan semua pihak untuk membantu warga dalam memanfaatkan lahan yang tersedia.

Menurut Bima Arya, hal yang harus segera diimplementasikan adalah aplikasi pupuk organik untuk mendukung potensi dari Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani Dewasa (KTD) dan lainnya. "Ini terinspirasi setelah kemarin saya ikut acara tradisi Mipit Amit Ngala Menta

Panen Pare di Lembur Sawah yang berlokasi di RT.02/RW.02, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan. Karena itu saya menitipkan sejumlah pesan kepada DKPP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan aparat wilayah Bogor Selatan," ungkap Bima kepada wartawan Rabu (23/2).

Bima melanjutkan, Camat Bogor Selatan ditunjuk menjadi pengendali agar kebutuhan warga bisa langsung dikordinasikan dengan DKPP Kota Bogor. Terkait Lembur Sawah sebagai Ubud-nya Kota Bogor, dirinya meminta titik-titik yang menjadi andalan wisata mulai untuk digarap sesuai rencana yang ditetapkan. ● pp

Dishub Razia Truk Tambang 'Nakal' di Kabupaten Bogor

CIBINONG (IM)- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor telah melakukan operasi kendaraan tambang di sejumlah titik Kabupaten Bogor sejak pertengahan Februari 2022. Operasi tersebut dilakukan untuk menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Tambang. Kepala Bidang Pengawasan Dishub Kabupaten Bogor, Bisma Wisuda, mengatakan operasi tersebut sudah dilakukan di lima titik Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Gunung Sindur.

"Memang kami sejak Februari 2022 telah melaksanakan kegiatan operasi di lima titik. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Danramil, Kapolsek, dan Camat supaya mobil nggak masuk ke Cisenceng," kata Bisma melalui telepon selulernya, Rabu (23/2).

Bisma menjelaskan, operasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Namun personel Dishub Kabupaten Bogor yang bertugas sudah siaga di titik-titik yang biasa dilewati kendaraan tambang mulai pukul 20.00 WIB.

Sesuai dengan Perbup Nomor 120 Tahun 2021, kendaraan tambang bisa beroperasi mulai pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB. "Jadi dengan Perbup Nomor 120 Tahun 2021, truk atau kendaraan pengangkut tambang nggak boleh melintas dari jam 05.00 WIB sampai 20.00 WIB" ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, setiap hari sejak 15 Februari pihaknya telah memutar balik sejumlah kendaraan tambang yang melanggar jam operasional. Terkait penambahan personel pengawas, Bisma mengatakan, Dishub Kabupaten

Bogor akan segera melakukan evaluasi sambil menunggu kabar dari Kepala Dinas.

"Pak Kadis lagi sakit, jadi mungkin nanti evaluasinya setelah Pak Kadis sembuh. Tapi anggota tetap standby di lapangan. Dari Dishub, Polsek, Koramil, dan Satpol PP," jelasnya.

Kendaraan tambang yang melanggar jam operasional menjadi perhatian bagi DPRD Kabupaten Bogor. Pada Senin (21/2), anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Tohawi duduk di tengah jalan mengadang belasan truk tambang yang masih beroperasi melebihi jam operasional yang sudah ditentukan.

Aksi tersebut dilakukan Tohawi lantaran merasa kesal, melihat truk tronton yang masih beroperasi di tengah aktivitas warga. Tohawi menjelaskan, aksinya diawali ketika ia sedang berada di perjalanan bersama sopirnya. Dalam jarak 3 kilometer, ia merasa heran kenapa waktu tempuh yang dibutuhkan mencapai 30 menit lebih.

"Pas sopir saya mendahului, ternyata di depan ada tronton konvoi empat unit. Dari yang arah berlawanan, tronton kosong banyak banget lebih dari 11 tronton dari arah berlawanan," katanya.

Tohawi mengatakan, hal ini dilakukannya untuk mewakili masyarakat. Di mana masyarakat tidak mau melongor perjalanannya. Dalam jarak 3 kilometer, ia merasa heran kenapa waktu tempuh yang dibutuhkan mencapai 30 menit lebih.

"Ini bentuk protes ke pengusaha (tambang). Kan ada aturan tolong ditegakkan. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari warga, diperikannya masih ada ribuan kendaraan tambang yang melanggar jam operasional setiap harinya. ● gio



IDN/ANTARA

AKSI JUAL WORTEL BAYAR SEIKLASNYA

Petani menggelar aksi jual wortel hasil panen dengan bayar seikhlasnya di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (23/2). Aksi petani wortel lereng Gunung Merapi dan Merbabu itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena harga wortel di pasaran anjlok Rp1.000 per kilogram serta masuknya hasil pertanian wortel dari luar daerah Jawa Tengah sehingga makin sulit menjual hasil panen wortel petani lokal.

Pemkot Bogor Tinjau Empat Pasar, Pedagang Tahu Tempe Kompak Mogok

BOGOR (IM)-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meninjau para pedagang tahu dan tempe yang kompak mogok massal berjalan selama tiga hari, yaitu pada 21-23 Februari 2022. Mogok itu dilakukan pedagang sesuai surat imbauan Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Primkopri) setempat.

"Pada Senin (21/2) tim dari Dinas Koperasi KUKM Perdagangan dan Perindustrian sudah memantau penjualan tempe tahu, mereka serentak melakukan mogok, sampai hari ini juga," kata Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DiskopUKMdagin) Kota Bogor, Mohamad Soleh di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/2).

Soleh mengatakan berdasarkan surat resmi dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) Jabar yang diterima mengenai mogok selama tiga hari itu, DiskopUKMdagin Kota Bogor segera melakukan peninjauan di dua pasar, yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor. Hasilnya, para pedagang tempe dan tahu memang melaksanakan mogok berjalan karena tidak mendapatkan stok dari produsen atau perajin tempe tahu di Kota Bogor.

Pantauan di empat pasar di Kota Bogor, yakni Pasar Anyar, Kebon Jahe, Warung Jambu, dan Pasar Baru Bogor secara bergiliran selama tiga hari ini, para pedagang tahu dan tempe menutup lapaknya. Sementara, beberapa pedagang yang tidak

khusus menjual tempe dan tahu memilih tetap membuka lapak meskipun harus melayani pertanyaan para pembeli yang berharap masih ada stok bisa dibeli.

Menemui salah satu pedagang cabai di Pasar Kebon Jahe, Andri mengatakan, lapak tempe dan tahu di sampingnya tutup karena memang ikut mogok massal. "Tutup tiga hari ini, belum tahu besok, kompak di sini," ujarnya.

Andri menunjuk beberapa lapak di samping dan belakangnya yang memang ditutupi terpal. Bergeser sedikit ke Pasar Anyar, pedagang lain yang sama Tono mengatakan tidak ada yang berjualan tempe dan tahu sejak imbauan mogok massal diedarkan. Para pedagang tempe dan tahu juga merasa keberatan untuk menjual dagangannya dengan harga mahal. "Tempe sama tahu cepet sekali tidak segar, beli tinggi, jual nanti susah, teman-teman mungkin tidak mau," katanya.

Sementara, para pedagang di Warung Jambu juga menyebut tidak menjual tempe dan tahu karena memang tidak ada pengiriman dari perajin. Seorang pedagang bernama Soleh mengatakan, mogok memang telah diinformasikan selama tiga hari, sehingga dirinya juga tidak mendapatkan barang tersebut hingga saat ini. "Saya kan yang jualan saja, kalau tidak ada mau apa yang dijual," kata Soleh.

Pun juga pedagang di Pasar Baru Bogor, Tohir mengaku, biasanya juga menjual tempe tahu yang selama tiga hari ini tidak ada yang mengirim. "Silakan dicari lapak lain juga tidak ada," ujarnya. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENURUNAN OKUPANSI HOTEL DI BANDUNG

Pekerja menyemprotkan cairan disinfektan di sebuah kamar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/2). Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan penerapan kembali pembatasan aktivitas masyarakat PPKM level 3 di wilayah Bandung Raya membuat okupansi hotel di wilayah ini anjlok hingga 22 Persen.

Pemprov Jabar Batalkan Anggaran Huntap Pengungsi di Sukajaya

Alasan tidak adanya bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Barat untuk membangun Huntap untuk para pengungsi itu bukan hanya karena defisit, tetapi karena belum siapnya calon lahan relokasi, baik di Kecamatan Sukajaya maupun Kecamatan Cigudeg, kata Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.

BANDUNG (IM)- Karena ketidaksiapan Pemkab Bogor dalam menyiapkan calon lahan relokasi pengungsi, Tahun 2022 ini, Pemprov Jawa Barat tidak menganggarkan biaya pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Cigudeg pada awal Tahun 2020 lalu.

"Alasan tidak adanya bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Barat untuk

bangunan Huntap untuk para pengungsi itu bukan hanya karena defisit, tetapi karena belum siapnya calon lahan relokasi, baik di Kecamatan Sukajaya maupun Kecamatan Cigudeg," ucap Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Rabu, (23/2).

Pengurus teras DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini menjelaskan jika lalu, nantinya, calon lahan relokasi siap. Ia berjanji akan memperjuangkan Bankeu yang tertunda tersebut.

"Tahun 2021 lalu, kita sudah memperjuangkan anggaran pemulihan pasca bencana alam yaitu membangun dua buah jalan di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Cigudeg, jika lalu nanti calon lahan relokasi siap, maka di Tahun 2023 mendatang akan kita upayakan ada Bankeu dari Pemprov Jawa Barat untuk membangun ratusan unit Huntap," jelasnya.

Mengenai adanya rencana relokasi mandiri seperti yang diutarakan pengungsi maupun pemerintahan desa setempat karena PT. Perkebunan Nusantara terkesan enggan menyerahkan lahan kebun sawitnya, Asep Wahyuwijaya mengaku setuju-setuju saja.

"Gak apa kalau relokasi dilakukan secara mandiri sesuai usulan pemerintah desa, asalkan pembangunan Huntapnya itu dilakukan seragam dan tertata seperti di Desa Urug, Sukajaya. Kami tak hanya ingin membangun rumah, tetapi juga kehidupan di mana ada sarana prasarana di lahan relokasi pengungsi korban bencana alam banjir

bandang dan longsor," tutur Asep Wahyuwijaya.

Sementara itu, Pemkab Bogor masih menunggu balasan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kepastian kelanjutan pembangunan Huntap di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg.

"Pemkab Bogor masih menunggu surat balasan dari Presiden Jokowi, mudah-mudahan segera dibalas atau dijawab karena baik anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran badan penanggulangan bencana nasional (BNPB) sudah siap, hingga kami harap proyek pembangunan Huntap tersebut segera bisa dilandaskan dan dibangun," ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin.

Burhanudin mengharapkan agar tidak ada ganti rugi pohon sawit dalam rencana pembangunan ratusan Huntap di lahan seluas 11 hektar tersebut, seperti yang diminta sebelumnya oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Penggunaan lahan yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII tersebut sudah sesuai arahan atau perintah Presiden Jokowi dan demi kepentingan para korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang. Dengan dasar karena penggunaan lahan kebun sawit tersebut merupakan arahan RI 1, Pemkab Bogor pun tak menyiapkan anggaran untuk penggantian pohon sawit tersebut," sambung Burhanudin.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika menutarakan bahwa proses penentuan lahan Huntap di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg juga sedang didiskusikan antara KemenPU-PR dengan Kementerian ATR/BPN.

"Sambil menunggu surat balasan dari Presiden Jokowi, KemenPU-PR dan Kementerian ATR/BPN juga sedang memastikan kesiapan dokumentasi lahannya," tutur Ajat. ● gio

SUKSESAN PEMILU TAHUN 2024

Diskominfo Berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Bogor

BOGOR (IM)- Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) siap berkolaborasi.

Anggota KPU Kabupaten Bogor yang juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Asep Saepul Hidayat mengatakan Diskominfo adalah mitra strategis KPU dalam mensukseskan Tahun Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut dikatakannya saat beraudien dengan Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Nia Indrawathi dan jajaran, di Ruang Rapat Kantor Diskominfo, Cibinong, Selasa (22/2).

Lebih lanjut Asep Saepul Hidayat menjelaskan Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar.

Bukan hanya di tingkat provinsi namun di Indonesia, yakni sebanyak 3,4 juta. Sampai saat ini data tersebut terus dilakukan pemutakhiran, yang jelas KPU Kabupaten Bogor menjadi salah satu KPU dengan beban yang luar biasa.

"Dengan kekuatan SDM yang terbatas, yakni hanya 13 orang ditambah 5 orang komisioner, harus menangani jumlah manusia yang besar, ini yang membuat kami harus berkolaborasi dan berkolaborasi dengan para stakeholder, salah satunya adalah Diskominfo sebagai dinas yang sangat strategis," ujar Asep.

La menambahkan, kalau hanya mengandalkan anggota yang sedikit akan rumit, sementara bebannya sangat besar. Tahun 2024, kita harus melaksanakan lima model dalam satu waktu, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD RI, DPRD, selanjutnya Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

"Tahun 2024 ini merupakan perhelatan hajat yang luar biasa, mumpung masih hajat yang luar biasa, mumpung masih ada waktu dua tahun, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Hal-hal apa saja yang bisa dikuatkan bersama dengan stakeholder. Terutama kita minta dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan sosialisasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bogor melalui Diskominfo," ungkap Asep.

Asep berharap, dengan kerja sama semua pihak akan memuluskan rencana-rencana yang disiapkan agar Kabupaten Bogor bisa melaksanakan hajat demokrasi yang berjalan sukses tanpa eksek, dan menjadi penyelenggara yang lebih baik.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Nia Indrawathi menuturkan, dengan segala sumber daya yang ada Diskominfo siap mendukung dan berkolaborasi bersama KPU Kabupaten Bogor untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

"Untuk dukungan jaringan teknologi informasi, Insya Allah kita bisa berikan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Soal sosialisasi, pasti akan kami bantu, kita punya berbagai kanal dan saluran informasi yang bisa dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat," terang Nia.

Nia menyebutkan, pada intinya Diskominfo siap mendukung kegiatan KPU, karena Pemilu dan Pilkada 2024 adalah hajat kita bersama. Mudah-mudahan seluruh kegiatan tahapan bisa berjalan lancar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga selesai pemilihan. ● gio



IDN/ANTARA

LELANG KAPAL ILLEGAL FISHING

Sejumlah Kapal Ikan Asing hasil sitaan berada di Pelabuhan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/2). Kejaksan Negeri Batam melelang 15 unit Kapal Ikan Asing (KIA) hasil sitaan terkait kasus penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia yang akan dilakukan pada 24 Februari 2022.

Pengolahan Sampah di Tasikmalaya Belum Maksimal

TASIKMALAYA (IM)- Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf menilai pengolahan sampah di daerahnya masih belum maksimal. Padahal, menurut dia, apabila diolah dengan baik, sampah dapat memberikan keuntungan. "Kami ingin sampah ini menjadi keuntungan buat kami. Sebab kalau tak dikelola dengan baik, akan membuat kerugian yang besar," kata dia, Rabu (23/2).

Karena itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan pengolahan sampah dengan baik. Menurut dia, paradigma pengolahan sampah harus berubah.

Yusuf menyontokkan, dinas terkait bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk mengolah sampah.

Misalnya, bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuat bank sampah. "Sampah kami kalau rata-rata sehari 200 ton, TPA Ciangir habis lahannya. Kami sudah mulai akan menambah lahan lagi tahun ini. Namun kalau terus begitu, tidak dikelola dengan baik, akan habis tanah kami untuk sampah," kata dia.

Yusuf mengungkapkan, saat ini sudah ada pihak swasta yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya untuk mengolah sampah, terutama sampah plastik. Pihak swasta itu hanya meminta batuan lahan. Mereka disebut akan mengolah sampah menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan. "Kami hanya minta kerja sama ini saling menguntungkan," kata dia. ● pur

Cegah Omicron Meluas, Jabar Masif Lakukan Tes dan Pelacakan

BANDUNG (IM)- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mengendalikan penyebaran Covid-19 varian Omicron. Ya, dengan mengintensifkan kegiatan pelacakan dengan tes PCR. Per 22 Februari 2022 tercatat penambahan 1.110 kasus, hingga total kasus aktif mencapai 169.978. Namun jumlah kesembuhannya juga bertambah sebanyak 6.983 orang.

"Daerah yang penambahan kasusnya tertinggi masih tetap di kawasan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Kota Bandung," ujar Ketua Harian Satgas Covid-19 Jabar, Dewi Sartika di Kota Bandung, Rabu (23/2).

Pemrov Jabar juga, kata Dewi, terus melakukan pelacakan dengan tes PCR sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi lebih luas. "Total sampel kita saat ini sudah mencapai 4.004.033 atau 4 juta lebih, dengan hasil positif lebih dari 27 persen, yang negatif lebih dari 72 persen," katanya.

Sementara yang menggunakan tes RDT atau antigen, kata dia, total saat ini mencapai 5.894.872 sampel, dengan hasil negatif 94,53 persen, dan positif 5,47 persen. "Jadi baik yang menggunakan PCR, maupun

tes cepat antigen, alhamdulillah, persentase positifnya jauh lebih kecil," kata Dewi.

Terkait dengan Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit, kata dia, mengalami penurunan 0,05 persen. Sementara penurunan keterisian tempat tidur di tempat isolasi terpadu sampai 21 Februari mengalami penurunan dari 902 menjadi 896.

Dalam menghadapi peningkatan kasus Covid-19, Sekda Jabar mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Tata Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Nomor 29/KPG.03.04/BKD, yang mengatur tata kerja di tiap SKPD yang harus menyesuaikan dengan penanganan Covid-19 level 3, 2, dan level 1. Bagi pegawai yang sudah divaksin melaksanakan tugas kedinasan WFO kapasitas 50 persen untuk level 3, kemudian 75 persen pada level 2, dan 100 persen untuk level 1.

Pemilihan persentase WFO dan WFH juga memperhatikan kategori kantor yang menangan hal esensial kritikal, serta titik berat kepada pelayanan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. ● pur